



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : KEP-20/N.2/Cr.3/09/2025

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2025

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 930);



9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan lembar atau dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

KEDUA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada poin Kesatu terdiri atas:

- a. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku Pimpinan Satuan Kerja.
- b. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon III dibawah Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- c. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV dibawah Pejabat Struktural Eselon III.

KETIGA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada poin Kesatu dan Kedua paling sedikit memuat pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu dengan ketentuan:

- a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditandatangani oleh Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan;



- b. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon III Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku atasan langsung;
- c. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Eselon IV Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ditandatangani Pejabat Struktural Eselon III selaku atasan langsung.

KEEMPAT : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud poin Kesatu, Kedua, dan Ketiga disusun dalam 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 01 September 2025

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT



WAHYUDI, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
2. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
3. Arsip.





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENEN SARIBANON, SH.,MH.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN
Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(ENEN SARIBANON, SH.,MH.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang Memenuhi Prinsip Keadilan	75%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	75
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	RP2.406.368.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp50.834.597.000
	Jumlah	Rp53.240.965.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,
PENEN SARIBANON, SH., MH.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANTON DELIANTO, S.H., M.H.
Jabatan : WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,

(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,

(ANTON DELIANTO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus Dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas Dan Koordinasi Dengan Oditurat Militer) Yang Memenuhi Prinsip Keadilan	75%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset Serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan Dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan Dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi Yang Optimal, Transparan Dan Akuntabel	Nilai Internal Evaluasi SAKIP	75
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Rincian Output	Anggaran
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.406.368.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 50.834.597.000
Jumlah		Rp 53.240.965.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,

WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

(ANTON DELIANTO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

(MUH ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	85%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	85%
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	85%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	85%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	85%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	85%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	75%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 184,164,000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 515,000,000
3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	Rp. 185,400,000
4	Dukungan Kegiatan Teknis Pekara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 82,500,000
Jumlah		Rp. 967,064,000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

(MUH ZULKIFLI SAID, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,

(IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	70%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	90%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan di wilayah Kejaksaan	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tinggi Nusa Tenggara Barat	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	90%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi	Rp. 400,000,000
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan	Rp. 53,844,000
3	Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan Restoratif pada Kejaksaan Tinggi	Rp. -
Jumlah		Rp. 453,844,000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,



(IRWAN SETIAWAN WAHYUHADI, S.H.,M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RICKY FEBRIANDI, S.H.
Jabatan : PLT ASISTEN PEMULIHAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA
TENGGARA BARAT,

PLT ASISTEN PEMULIHAN ASET,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

(RICKY FEBRIANDI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	80%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	80%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Rp 200.000.000
Jumlah		Rp 200.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA
TENGGARA BARAT,

PLT ASISTEN PEMULIHAN ASET,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)



(RICKY FEBRIANDI, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU TRIANTONO, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PENGAWASAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA
TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN,

(WAHYU TRIANTONO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memperoleh predikat AKIP minimal A	BB / 75%
2	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang dijatuhi hukuman disiplin	5%
3	Terselenggaranya Kejaksaan RI sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi	Persentase satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Bersih dan Melayani (WBBM)		

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit reuiu	Rp. 200.000.000
2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
5	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Pendampingan BPK	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA
TENGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN,



(WAHYU TRIANTONO, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADE INDRAWAN, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(ADE INDRAWAN, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	80%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	80%
2	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 30,000,000
2	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 60,000,000
3	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 9,600,000
4	Pengelolaan Halo JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 9,600,000
5	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 35,000,000
Jumlah		Rp. 144,200,000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA,

(ADE INDRAWAN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA
TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN INTELIJEN,

(SUHARTONO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	85%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	85%
3	Meningkatnya pelaksanaan	Persentase pelaksanaan Operasi	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	85%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	85%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	85%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	85%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 60.000.000
2	Kegiatan/ Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 60.000.000
3	Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	Rp. 72,500,000
4	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 100,000,000
5	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 77,952,000
6	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 84,800,000
7	Pelaksanaan Pelayanan Media dan Kehumasan	Rp. 18,000,000
8	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58,008,000
9	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp 80,000,000
10	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan	Rp. 30,000,000

Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	
Jumlah	Rp. 641.260.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA
TENGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN INTELIJEN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

(SUHARTONO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rochman Marsudi, S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Tindak Pidana Umum dan Pemulihan Aset pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Triantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pengawasan,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Pemeriksa Tindak Pidana Umum dan
Pemulihan Aset,

(Rochman Marsudi, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	0
		Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit reviu	Rp. 200.000.000
2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
5	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Pendampingan BPK	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pengawasan,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Pemeriksa Tindak Pidana Umum dan
Pemulihan Aset,

(Rochman Marsudi, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helmy Hidayat, S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Intelijen pada Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Triantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Intelijen
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Helmy Hidayat, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	0
		Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit reuiu	Rp. 200.000.000
2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
5	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Pendampingan BPK	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Intelijen
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Helmy Hidayat, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Sumardi, S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Triantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

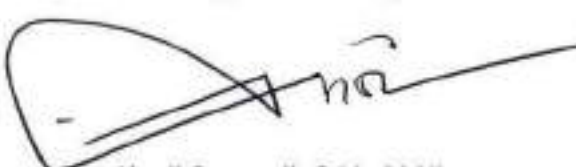
Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Andi Sumardi, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	0
		Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit reviu	Rp. 200.000.000
2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
5	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Pendampingan BPK	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Andi Sumardi, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pintono Hartoyo, S.H.
Jabatan : Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan
Tinggi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Triantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pengawasan,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha
Negara


(Pintono Hartoyo, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	0
		Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit reviu	Rp. 200.000.000
2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
5	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Pendampingan BPK	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pengawasan,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha
Negara

(Pintono Hartoyo, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Salmia, S.H
Jabatan : Pemeriksa Keuangan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Triantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,



(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Pemeriksa Keuangan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,



(Siti Salmia, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	0
		Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit reviu	Rp. 200.000.000
2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
5	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Pendampingan BPK	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,



(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Keuangan
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,

(Siti Salmia, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahyadi, S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Pidana Militer pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Triantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pengawasan,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan
Pidana Militer

(Cahyadi, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	0
		Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelaksanaan inpeksi umum, pemantauan, audit reviu	Rp. 200.000.000
2	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 34.400.000
3	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus terdapat pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.520.000
4	Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000
5	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan / Pendampingan BPK	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 404.920.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan
Pidana Militer,



(Cahyadi, S.H., M.H.)



Pihak Kedua
Asisten Bidang Pengawasan,

(Wahyu Triantono, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendarsyah Yusuf Permana, S.H., M.H.
Jabatan : PLT Kepala Seksi Penuntutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 12 September 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
PLT Kepala Seksi Penuntutan,

(Hendarsyah Yusuf Permana, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	Rp 185.400.000
	Jumlah	Rp 185.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

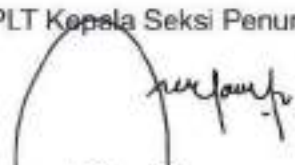
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Murtuzulki Said, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
PLT Kepala Seksi Penuntutan,

(Hendarsyah Yusuf Permana, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendarsyah Yusuf Permana, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

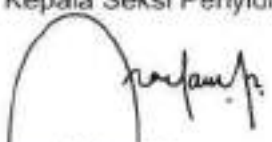
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penyidikan,

(Hendarsyah Yusuf Permana, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 184.164.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 515.000.000
Jumlah		Rp 699.164.000

D. PRIORITAS NASIONAL

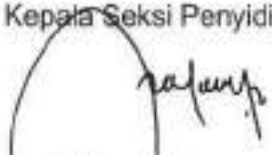
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penyidikan,

(Hendarsyah Yusuf Permana, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdirun Luga Harlianto, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

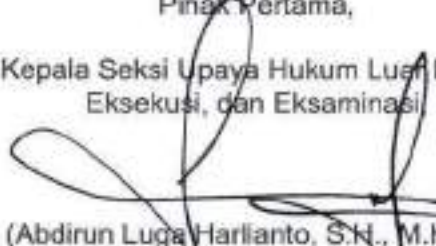
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa,
Eksekusi, dan Eksaminasi

(Abdirun Luga Harlianto, S.H., M.Hum.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	90%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 82.500.000
	Jumlah	Rp 82.500.000

D. PRIORITAS NASIONAL


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa,
Eksekusi dan Eksaminasi,

(Abdinun Luga Harlianto, S.H., M.Hum.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfierro, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Operasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengendalian Operasi,

(Alfierro, S.H., M.H.)

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

No	Rincian Output	Anggaran
1	-	-
2	-	-
Jumlah		-

D. PRIORITAS NASIONAL


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,

(Muh Zulkifli Said, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengendalian Operasi,

(Afferro, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Darmawijaya, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi C

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,
(Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.)

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi C,


(Agus Darmawijaya, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70
2	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Peruntutan	90
3		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		hingga Penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 400.000.000
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 53.844.000
3	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum	-
	Jumlah	Rp. 453.844.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi C,

Pihak Kedua
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,

(Irwan Setiawan, S.H., M.H.)

(Agus Darmawijaya, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heru Sandika Triyana, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi A,

Rusak Kedja
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,

(Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.)

(Heru Sandika Triyana, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	90%
3		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		hingga Penuntutan	
4		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi	Rp. 400.000.000
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi	Rp. 53.844.000
3	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum	-
	Jumlah	Rp. 453.844.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,

(Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi A,

(Heru Sandika Triyana, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basuki Arif Wibowo, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Seksi D

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

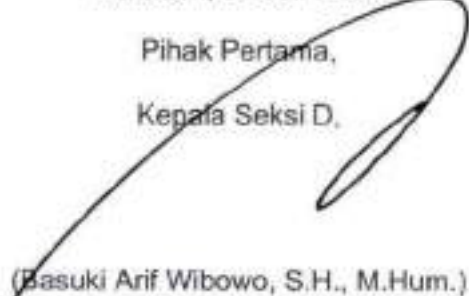
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,

(Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi D,

(Basuki Arif Wibowo, S.H., M.Hum.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70
2	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	90
3		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		hingga Penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 400.000.000
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 53.844.000
3	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum	-
Jumlah		Rp. 453.844.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,

(Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi D,

(Basuki Arif Wibowo, S.H., M.Hum)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Budi Muklish, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi B

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

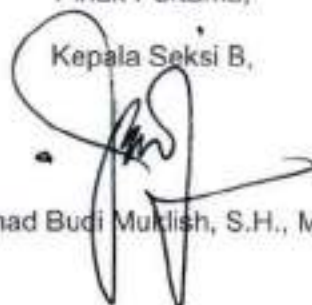
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,

(Irwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi B,

(Ahmad Budi Muklish, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70
2	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	90
3		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		hingga Penuntutan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 400.000.000
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 53.844.000
3	Layanan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum	-
	Jumlah	Rp. 453.844.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

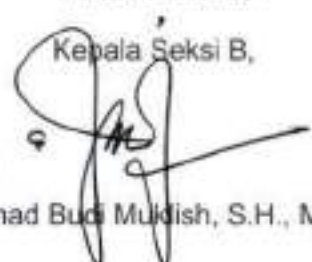
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Tindak Pidana Umum,
(Iwan Setiawan Wahyuhadi, S.H., M.H.)



Pihak Pertama,
Kepala Seksi B,
(Ahmad Budi Muklish, S.H., M.H.)





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFRIEN SAPUTERA, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Seksi V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,
(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Seksi V,


(EFRIEN SAPUTERA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	50%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp. 80.000.000
	Jumlah	Rp. 80.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,

Pit. Kepala Seksi V,



(EFRIEN SAPUTERA, S.H., M.H.)



(SUHARTONO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : THORIQ MULAHELA, S.H., M.H..
Jabatan : Kepala Seksi IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H..
Jabatan : Asisten Bidang Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,
(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi IV,

(THORIQ MULAHELA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 100,000,000
	Jumlah	Rp. 100.000.000


D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.


Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,
(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi IV,

(THORIQ MULAHELA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDI TANTO PUTRA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,

(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi III,

(EDI TANTO PUTRA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 60,000,000
2	Kegiatan Penelusuran Aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri	Rp. 72,500,000
3	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30,000,000
Jumlah		Rp. 162.500.000

D. PRIORITAS NASIONAL


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,

(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi II,

(EDI TANTO PUTRA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EFRIEN SAPUTERA, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Penerangan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,

(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penerangan Hukum,

(EFRIEN SAPUTERA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 18,000,000
2	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 77,952,000
3	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 84,800,000
Jumlah		Rp. 180.752.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,

(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Mataram, 01 Juli 2025
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penerangan Hukum,

(EFRIEN SAPUTERA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPARDIN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,

(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi I,

(SUPARDIN, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 60,000,000
	Jumlah	Rp. 60.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.


Pihak Kedua,
Asisten Bidang Intelijen,
(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi I,

(SUPARDIMAN, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROMULA HASONANGAN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHARTONO, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Intelijen,



(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Seksi II,

(ROMULA HASONANGAN, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90%
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 60,000,000
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58,008,000
Jumlah		118,008,000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

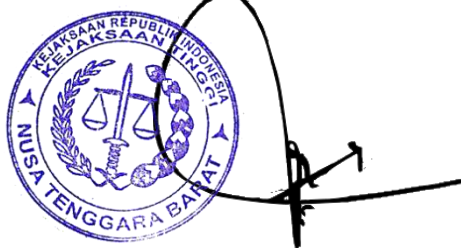
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Intelijen,



(SUHARTONO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Seksi II,



(ROMULA HASONANGAN, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chalis Al Rossi, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Subbidang Penyelesaian Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ricky Febriandi, S.H.
Jabatan : Plt. Asisten Bidang Pemulihan Aset

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Plt. Asisten Bidang Pemulihan Aset,

(Ricky Febriandi, S.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbidang Penyelesaian Aset,

(Chalis Al Rossi, S.H.,M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pemulihan Aset	Presentase Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pemulihan Aset Negara	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang/bukti/sitaan/rampasan	Rp. 200.000.000
	Jumlah	Rp. 200.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Pit/Asisten Bidang Pemulihan Aset,

(Ricky Febriandi, S.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbidang Penyelesaian Aset,

(Chalis Al Rossi, S.H.,M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Adi Sugiarto, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Subbidang Manajemen Pengelolaan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ricky Febriandi, S.H.
Jabatan : Plt. Asisten Bidang Pemulihan Aset

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Plt. Asisten Bidang Pemulihan Aset,

(Ricky Febriandi, S.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subbidang Manajemen
Pengelolaan Aset,

(Akhmad Adi Sugiarto, S.H.,M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pemulihan Aset	Presentase Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pemulihan Aset Negara	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang/bukti/sitaan/rampasan	Rp200.000.000
	Jumlah	Rp200.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pjt. Asisten Bidang Pemulihan Aset,



(Ricky Febriandi, S.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subbidang Manajemen
Pengelolaan Aset,

(Akhmad Adi Sugiarto, S.H.,M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Isa Ansyori, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ricky Febriandi, S.H.
Jabatan : Plt. Asisten Bidang Pemulihan Aset

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Plt. Asisten Bidang Pemulihan Aset,

(Ricky Febriandi, S.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset,

(Mohamad Isa Ansyori, S.H.,M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pemulihan Aset	Presentase Penyelesaian, Penyelamatan, dan Pemulihan Aset Negara	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang/bukti/sitaan/rampasan	Rp. 200.000.000
	Jumlah	Rp. 200.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pt. Asisten Bidang Pemulihan Aset,

(Risky Febriandi, S.H.)



Pihak Pertama,

Kepala Subbidang Penelusuran dan Perempasan Aset,

(Mohamad Isa Ansyori, S.H.,M.H.)





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Wibianto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Indrawan, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perdata

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara,

(Ade Indrawan, S.H., M.H.)


(Bayu Wibianto, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	80%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Nusa Tenggara Barata	Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Nusa Tenggara Barat	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 60.000.000
	Jumlah	Rp 60.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata,

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara,

(Ada Indrawan, S.H., M.H.)


(Bayu Wibianto, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Gede Sugiarta, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pertimbangan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Indrawan, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara,

(Ade Indrawan, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pertimbangan Hukum,

(I Putu Gede Sugiarta, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp 9.600.000
2	Pertimbangan Hukum/Penampungan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp 30.000.000
Jumlah		Rp 39.600.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,



Asisten Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara,

(Ade Indrawan, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pertimbangan Hukum,

(I Putu Gede Sugiarta, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Bustami Makki, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ade Indrawan, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara,
(Ade Indrawan, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tata Usaha Negara,

(Faisal Bustami Makki, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 60.000.000
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 35.000.000
Jumlah		Rp 95.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tata Usaha Negara,



(Faisal Bustami Makki, S.H., M.H.)

Pihak Kedua,

Asisten Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara,



(Ade Indrawan, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum.
Jabatan : ASISTEN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHYUDI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA
TENGGARA BARAT,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMBINAAN,

(DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Persentase satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	90%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91%
2	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah Satker di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	5
3	Meningkatnya kuantitas dan	Persentase sarana dan prasarana	60%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	sesuai standar kebutuhan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	
4	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	2,75 %
		Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi BMN di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	20%
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 663.458.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 49.116.430.000
3	Layanan Sarana Internal	Rp. 649.789.000
	Jumlah	Rp. 50.429.677.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT,

ASISTEN PEMBINAAN,



(WAHYUDI, S.H., M.H.)

(DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zubaidi, S.T.,S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Asisten Bidang Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Perencanaan,

(Ahmad Zubaidi, S.T.,S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (BK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Agung	BB
3	Menyiapkan rencana dan koordinasi perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana	Pembuatan rencana strategis rencana kerja, laporan kinerja, laporan (silabin), triwulan, dan tahunan, penyusunan RKAKL, pelaksanaan revisi DIPA,	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan program kerja, pemantauan, penilaian, serta pengendalian pelaksanaannya	monitoring dan evaluasi kinerja anggaran	
4	Pembinaan manajemen, organisasi tata laksana dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ANJAB ABK)	Adanya kegiatan analisa jabatan, analisa beban kerja dan peta jabatan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	70

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 663.458.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 49.116.430.000
	Jumlah	Rp. 49.779.888.000

D. PRIORITAS NASIONAL


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Dorina Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Perencanaan,

(Ahmad Zubaidi, S.T.,S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tarmizi, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Asisten Bidang Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

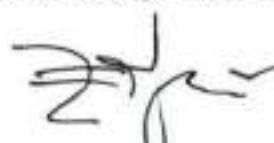
Mataram, 01 Juli 2025



Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H., M.Hum.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum,


(Tarmizi, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	60%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 663.458.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 49.116.430.000
3	Layanan Sarana Internal	Rp. 649.789.000
	Jumlah	Rp. 50.429.677.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025



Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Umum,

(Tarmizi, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harry Saparil Tokhali, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Asisten Bidang Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Keuangan,

(Harry Saparil Tokhali, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	90%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 663.458.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 49.116.430.000
Jumlah		Rp. 49.779.888.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Keuangan,

(Harry Sapari Tokhali, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabda, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Asisten Bidang Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

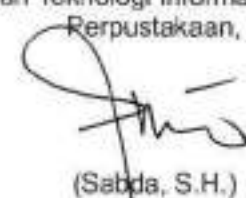
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal
dan Teknologi Informasi dan
Perpustakaan,

(Sabda, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	90%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	91%
2	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Jumlah Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (BK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	5
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana	60%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Sesuai Kebutuhan	

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 663.458.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 49.116.430.000
	Jumlah	Rp. 49.779.888.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025



Pihak Kedua,

Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan,

(Sabda, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zohri, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Asisten Bidang Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Rumiris Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Kepegawaian,

(Zohri, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kejaksaan RI	Presentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	85%
		Presentase Pejabat Struktural sesuai kompetensi	95%
		Persentase satuan kerja yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan	90%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp. 663.458.000
2	Layanan Perkantoran	Rp. 49.116.430.000
	Jumlah	Rp. 49.779.888.000

D. PRIORITAS NASIONAL

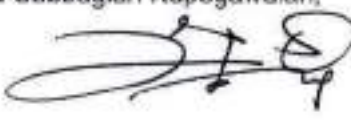
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Mataram, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,
Asisten Bidang Pembinaan,

(Donna Ruminis Sitorus, S.H.,M.Hum.)

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Kepegawaian,

(Zohri, S.H.)